



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
UNIT KERJA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IWAN HERMAWAN
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 170035

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 1.450.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m²/73 m² di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 360 m²/400 m² di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 252.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOTOR, KAWASAKI NINJA RR SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000
3. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
5. MOBIL, TOYOTA ETIOS MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 79.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 82.209.920

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 27.269.514

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.811.479.434

III. HUTANG

Rp. 480.799.578

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.330.679.856



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.